

## **BAB II**

### **TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan adanya referensi atau pedoman dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan variabel yang sama antara lain adalah penelitian dari Devarajan et al 1996, Sodik 2007, Swaramarinda dan Indriani 2011, Larengkum dkk 2014 serta penelitian dari Saez et al 2017.

Devarajan et al, 1996 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan menggunakan data panel di 43 Negara Berkembang selama periode penelitian 1970-1990 menunjukkan peningkatan pengeluaran rutin dan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sodik, 2007 menjelaskan bahwa dengan menggunakan data panel selama periode pengamatan 1993-2003 investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada 26 provinsi di Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada 26 provinsi di Indonesia.

Swaramarinda dan Indriani, 2011 mengatakan bahwa dengan menggunakan data time series selama periode penelitian tahun 1997-2007 berdasarkan uji simultan terdapat pengaruh positif antara pengeluaran

konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pengeluaran investasi pemerintah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Larengkum dkk, 2014 menjelaskan bahwa sepanjang 2007 sampai 2012 realisasi belanja APBD yang paling besar adalah pada belanja rutin. Sedangkan belanja modal yang nota bene merupakan belanja untuk kegiatan pembangunan justru jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan belanja biaya operasi yang di dalamnya berisi belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi dan lain-lain. Hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi belanja APBD memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan PDRB Riil di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini juga berarti bahwa realisasi belanja APBD berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Saez et al, 2017 dalam penelitiannya di Uni Eropa selama periode penelitian 1994-2012 mengatakan bahwa Negara yang memperoleh hasil hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah Portugal dan United Kingdom. Sedangkan negara yang memperoleh hasil negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah Austria, Finlandia, Italia dan Swedia. Dan ada beberapa juga yang mendapatkan hasil tidak signifikan yaitu Belgia, Perancis, Yunani, Irlandia, Luxembourg, Belanda dan Spanyol.

Posisi penelitian disini adalah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian

ini adalah terletak pada periode penelitian, penggunaan istilah pada variabel dependen serta lokasi penelitian yang berfokus pada satu koridor di Provinsi Jawa Timur.

## B. Landasan Teori

### 1. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Case dan Fair Produk Domestik Bruto atau GDP merupakan nilai pasar total output suatu negara, nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara. GDP dapat dihitung melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Menghitung GDP melalui pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menjumlahkan semua jumlah total yang dibelanjakan pada semua barang akhir selama periode tertentu. Pendekatan pengeluaran menghitung GDP dengan menjumlahkan empat komponen belanja dalam bentuk persamaan:

$$GDP = C + I + G + (EX - IM)$$

Yang mana,

C = Pengeluaran konsumsi pribadi

I = Investasi swasta dalam negeri bruto

G = Konsumsi dan investasi bruto pemerintah

EX-IM = Ekspor neto

Sedangkan menghitung GDP atau Produk domestik Bruto melalui pendekatan pendapatan yaitu dengan cara menjumlahkan

pendapatan upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam menghasilkan barang akhir. Pendekatan pendapatan melihat GDP dalam hal siapa yang menerimanya sebagai pendapatan, bukan siapa yang membelinya. Komponen dalam GDP ini antara lain adalah: kompensasi karyawan, pendapatan perusahaan perseorangan, pendapatan sewa, laba perseroan terbatas, bunga neto, pajak tak langsung dikurangi subsidi, pembayaran transfer bisnis neto, dan surplus perusahaan pemerintah (Case dan Fair, 2007 hal 24).

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto digunakan dua pendekatan yakni lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dan menurut penggunaannya. Produk Domestik Regional Bruto dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (Badan Pusat Statistik).

## 2. Teori Makroekonomi Keynesian

Secara kasar pandangan makroekonomi Keynes meliputi tiga aspek pokok yaitu peranan pengeluaran agregat, penentuan suku bunga dan peranan uang, serta peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2012 hal 231).

### a. Peranan pengeluaran agregat

Analisis keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis ini tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan perubahan kualitas faktor-faktor produksi. Jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu terdapat pertalian erat antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja. Apabila pengeluaran agregat bertambah maka kegiatan ekonomi, produksi nasional dan kesempatan kerja meningkat.

b. Peranan uang dan suku bunga

Keynes menerangkan efek perubahan penawaran uang pada kegiatan ekonomi melalui efek perubahan penawaran uang ke suku bunga, efek perubahan suku bunga ke investasi, dan efek perubahan investasi ke pengeluaran agregat dan pendapatan nasional.

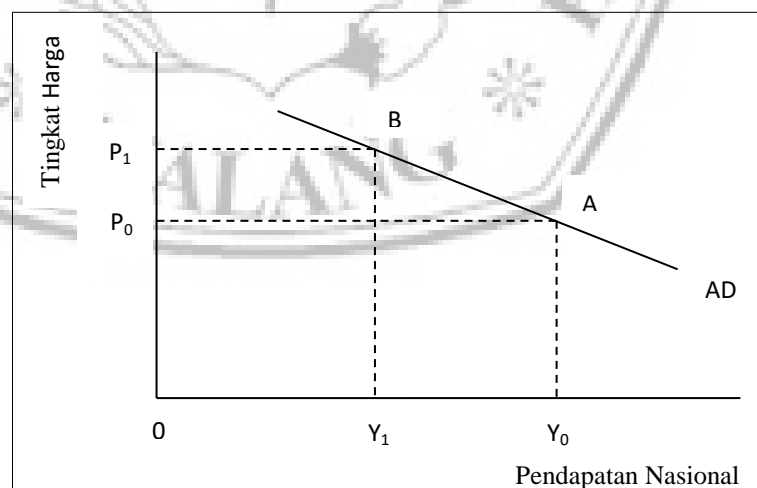
c. Peranan kebijakan pemerintah

Menurut keynes tanpa adanya peranan pemerintah atau dengan kata lain perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, maka perekonomian akan sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan tentunya terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Dalam menghadapi masalah ini keynes menekankan tentang perlu

adanya campur tangan pemerintah dalam usaha untuk mencapai kesempatan kerja penuh tanpa inflasi.

Analisis keynes menunjukkan pentingnya peranan pengeluaran agregat atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan dalam menentukan suatu perekonomian. Ini berarti analisis keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat atau dengan kata lain permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menerangkan hubungan antara tingkat harga yang umum dalam perekonomian dan perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian (Sukirno 2012, hal 94).

Kurva permintaan agregat merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang berarti semakin rendah tingkat harga maka semakin besar permintaan agregat.



Sumber: Sukirno, 2012 hal 237

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Agregat

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat banyak teori tentang pertumbuhan ekonomi tetapi tidak satu teoripun yang komperhensif yang menjadi standart baku, salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang sekiranya cukup untuk menerangkan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori ini mempunyai tujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai steady growth dalam jangka panjang. Dalam analisisnya, Harrod-Domar mengatakan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai pada kapasitas penuh, pengeluaran agregat akan mengakibatkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, investasi pada suatu waktu tertentu akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun berikutnya. Dalam teori Harrod-Domar tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi terdiri dari tiga sektor atau empat sektor (Sukirno, 2012 hal 435).

### 4. Pengeluaran Pemerintah

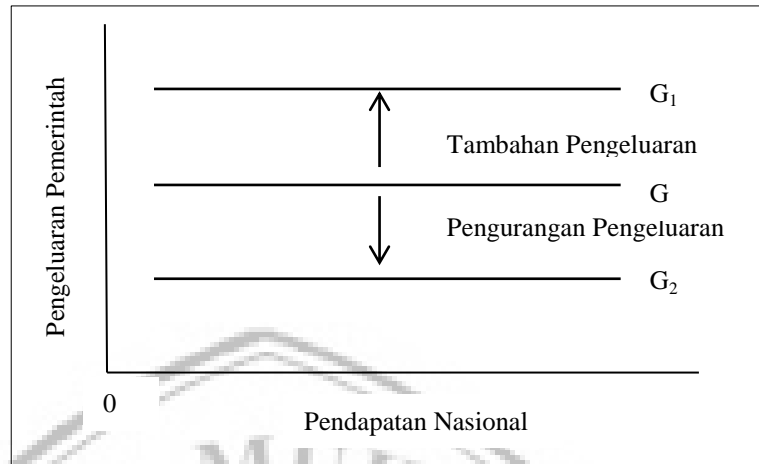
Pengeluaran pemerintah sangat berbeda dengan pengeluaran rumah tangga yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah membeli barang untuk kepentingan masyarakat seperti penyediaan fasilitas-fasilitas umum. Pengeluaran pemerintah ini digolongkan dalam dua golongan utama yaitu konsumsi pemerintah

dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi seperti membayar gaji pegawai, membeli peralatan dan lain-lain. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit (Sukirno, 2012 hal 38).

a. Fungsi pengeluaran pemerintah

Pendapatan nasional tidak memegang peran penting dalam menentukan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi misalnya pendapatan pajak berkurang, tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan sehingga pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka fungsi pengeluaran pemerintah adalah seperti yang digambarkan dalam Gambar 2.1 yaitu sejajar dengan sumbu datar. Dengan demikian besarnya tidak tergantung pada pendapatan nasional (Sukirno, 2012 hal 169).





Sumber: Sukirno, 2012 hal 169

Gambar 2.2 Fungsi Pengeluaran Pemerintah

b. Perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro

Menurut Mangkoesoebroto (2016 hal 177) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan permintaan dan penawaran untuk barang publik yang kemudian menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik tersebut akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$U^i = f(G, X)$$

Dimana,

$G$  = Vektor dari barang publik

$X$  = Vektor barang swasta

$I$  = individu;  $i = 1, \dots, m$

$U$  = fungsi utilitas

Perkembangan pengeluaran pemerintah sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik
  2. Perubahan harga faktor-faktor produksi
  3. Perubahan kualitas barang publik
  4. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perkembangan pengeluaran pemerintah secara makro

Teori makro tentang pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 2016 hal 170). Menurut Musgrave pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin tinggi pula barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave, menurut Wagner jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas.

Kelemahan dari hukum Wagner ini adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori tentang pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n} \dots\dots\dots(2.9)$$

Dimana :

$P_kPP$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

$PPK$  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah pendapatan

1,2,n : Jangka waktu (tahun)

Peacock dan Wiseman menyampaikan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Namun di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal

meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara.

d. Klasifikasi pengeluaran pemerintah

1) Berdasarkan PP 24 Tahun 2005

Dalam PP 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yang dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial. Belanja modal meliputi Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya, sedangkan Belanja Tak Terduga antara lain belanja untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga (Mahmudi, 2010 hal 100).

2) Berdasarkan PP 58 Tahun 2005

Pengklasifikasian belanja disini memang sedikit berbeda dengan klasifikasi belanja menurut PP 24 Tahun 2005, namun kedua peraturan tersebut sebenarnya tidaklah bertentangan. Dalam PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 59 Tahun 2007,

belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal (Mahmudi, 2010 hal 100).

#### 5. Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto

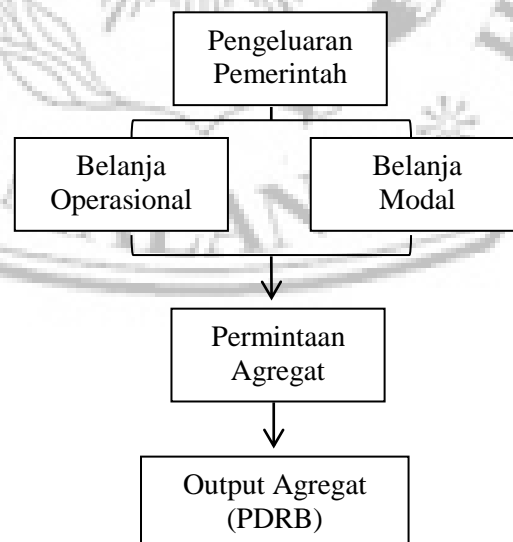
Kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. John F. Due (1968) mengemukakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat Gross National Product nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga dengan mempengaruhi besarnya Gross National Product dan pendapatan riil akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi (Rahayu, 2010 hal 211).

Menurut pandangan keynes, melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa

yang diperlukan maupun untuk menambah investasi pemerintah (Sukirno 2012, hal 24).

### C. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pengadaan barang modal. Pengadaan barang modal sendiri dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat ditempuh melalui peningkatan belanja pemerintah. Ketika belanja pemerintah meningkat, maka akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan yang artinya meningkatkan output agregat. Kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan ( $AE = C + I + G$ ), yang menyebabkan peningkatan output pada tingkat harga yang mungkin (Case dan Fair, 2007 hal 197).



Sumber: Swaramarinda dkk, 2011 (diolah)

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah disebutkan di atas maka dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu “ Diduga pengeluaran pemerintah baik belanja operasional maupun belanja modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada koridor utara selatan di Provinsi Jawa Timur.”



